

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan bagian dari sektor industri manufaktur yang memiliki peranan penting dalam penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pendapatan Masyarakat (BPS, 2023). Industri Mikro dan Kecil (IMK) merupakan salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dibandingkan sektor lainnya.

Namun demikian, dalam satu dekade terakhir, kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan, dari 23,69 persen pada tahun 2013 menjadi 18,64 persen pada tahun 2023 (BPS, 2024). Di sisi lain, Industri Mikro dan Kecil (IMK) yang sebagian besar bergerak di bidang industri padat karya memainkan peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mendukung perekonomian lokal. Dengan karakteristik modal terbatas, pemanfaatan tenaga kerja keluarga, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan pasar, IMK memiliki potensi besar untuk bertahan dan berkembang di tengah tantangan penurunan kontribusi sektor manufaktur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2023), IMK berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 9,42 juta orang pada tahun 2022, sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu motor penggerak sektor industri di tingkat mikro.

IMK di Indonesia memegang peranan krusial dalam pembangunan ekonomi nasional. Tidak hanya sebagai penggerak perekonomian di tingkat lokal, UMK juga berperan besar dalam penyerapan tenaga kerja dan pemerataan

pendapatan masyarakat (BPS, 2023). Namun, peran penting ini tidak lepas dari berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek struktural, teknologi, maupun manajerial. Pada tahun 2015, perhatian terhadap IMK semakin menguat seiring dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara ini membuka peluang sekaligus menimbulkan kekhawatiran atas kesiapan UMK Indonesia dalam menghadapi persaingan regional, terutama dalam hal daya saing dan efisiensi (Tambunan, 2016).

Rendahnya daya saing IMK di masa itu ditandai oleh keterbatasan akses terhadap teknologi modern, permodalan, serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya kompeten. Sebagaimana diungkap oleh Kementerian Koperasi dan UKM (2015), banyak pelaku UMK yang masih mengandalkan metode tradisional dalam produksi dan distribusi. Di samping itu, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk lokal juga relatif rendah dibandingkan produk luar negeri yang lebih dikenal dan dianggap memiliki jaminan mutu lebih baik. Hal ini diperparah oleh lemahnya strategi komunikasi dan pemasaran UMK, sehingga kesulitan menjangkau konsumen yang lebih luas dan membangun loyalitas pelanggan (Pratiwi & Wijayanto, 2017). Ketiadaan *assurance* atau jaminan atas mutu produk dan layanan sering kali menjadi penyebab utama konsumen mudah berpindah ke penyedia lain yang menawarkan kualitas dan kepercayaan lebih baik.

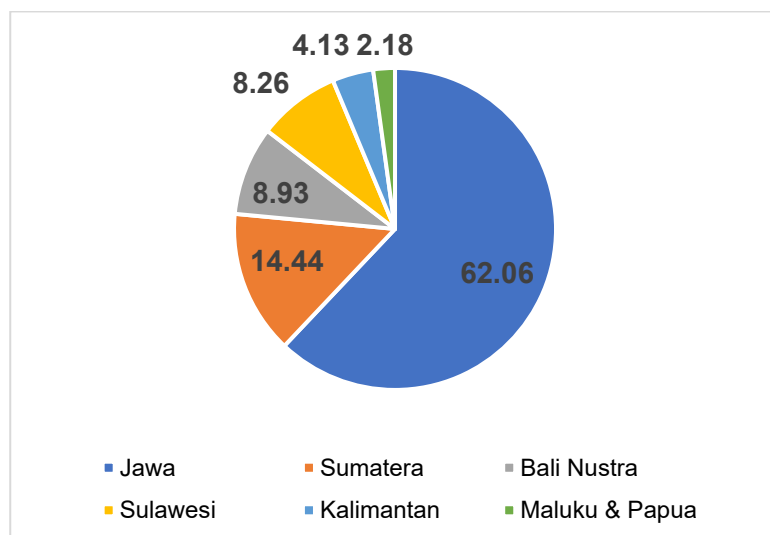
Memasuki periode 2023 hingga 2025, tantangan UMK semakin berkembang seiring dengan transformasi digital dan perubahan perilaku konsumen pasca pandemi COVID-19. Digitalisasi menjadi suatu keharusan, tetapi pada kenyataannya masih belum merata. Menurut laporan Bank Indonesia (2023), hanya sebagian kecil IMK yang telah mengintegrasikan teknologi digital dalam operasional mereka. Sebagian besar masih bergantung pada metode

konvensional, baik dalam hal transaksi, promosi, maupun pelayanan pelanggan. Ketertinggalan ini membuat IMK sulit bersaing di tengah maraknya e-commerce dan platform digital, di mana konsumen dengan mudah membandingkan produk, harga, dan ulasan pelanggan secara real time.

Dalam hal ini, *trust* atau kepercayaan menjadi elemen kunci yang menentukan keberlanjutan IMK. Kepercayaan tidak dibangun dalam waktu singkat, melainkan melalui proses konsisten yang melibatkan kualitas layanan, komunikasi yang baik, serta adanya jaminan atas mutu produk (Kotler & Keller, 2016). Konsumen modern cenderung lebih selektif dan kritis dalam mengambil keputusan, sehingga IMK harus mampu meyakinkan mereka melalui pelayanan yang berorientasi pada kepuasan dan kepastian. Sayangnya, masih banyak IMK yang belum memiliki sistem layanan purna jual yang memadai, sehingga menurunkan kepuasan pelanggan dan mendorong mereka untuk berpindah ke pesaing yang dianggap lebih profesional (Rahman & Hermansyah, 2022)

Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Tambunan (2012) mengungkapkan bahwa keberadaan UMK di berbagai provinsi secara langsung berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, meskipun efeknya bervariasi tergantung pada kondisi lokal masing-masing daerah. Studi lain yang dilakukan oleh Sitepu (2023) menegaskan bahwa UMK berfungsi sebagai tulang punggung ekonomi yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Berdasarkan kedua penelitian tersebut, UMK tidak hanya menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga berperan dalam menciptakan distribusi ekonomi yang lebih merata. Oleh karena itu, pengembangan UMK harus menjadi fokus kebijakan ekonomi nasional untuk

memastikan pertumbuhan yang inklusif dan pengurangan kemiskinan di Indonesia.

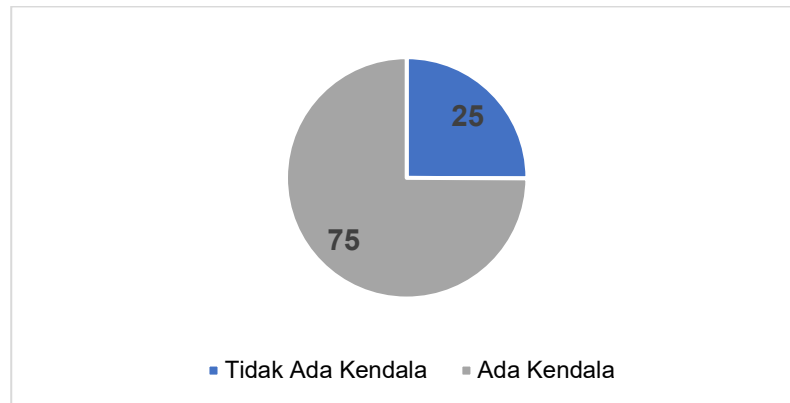


Gambar 1. 1 Sebaran Usaha/Perusahaan IMK Menurut Pulau, 2023

Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), diperkirakan sebanyak 4,5 juta usaha IMK tersebar diseluruh wilayah Indonesia, baik perkotaan maupun pedesaan. Namun demikian, sebaran IMK belum merata ke seluruh wilayah Indonesia. Sebaran geografis industri mikro dan kecil (IMK) di Indonesia pada tahun 2023 menunjukkan adanya konsentrasi yang dominan di Pulau Jawa, yaitu sebesar 62,06 persen dari total populasi usaha. Kondisi ini mengindikasikan bahwa aktivitas ekonomi nasional masih terpusat di wilayah dengan infrastruktur dan akses pendanaan yang lebih memadai. Sementara itu, wilayah Sumatera (14,44 persen), Bali Nusa Tenggara (8,93 persen), dan Sulawesi (8,26 persen) menunjukkan kontribusi yang relatif signifikan namun belum proporsional dengan potensi regional masing-masing. Adapun Kalimantan (4,13 persen) serta Maluku dan Papua (2,18 persen) menunjukkan tingkat partisipasi yang terbatas, yang

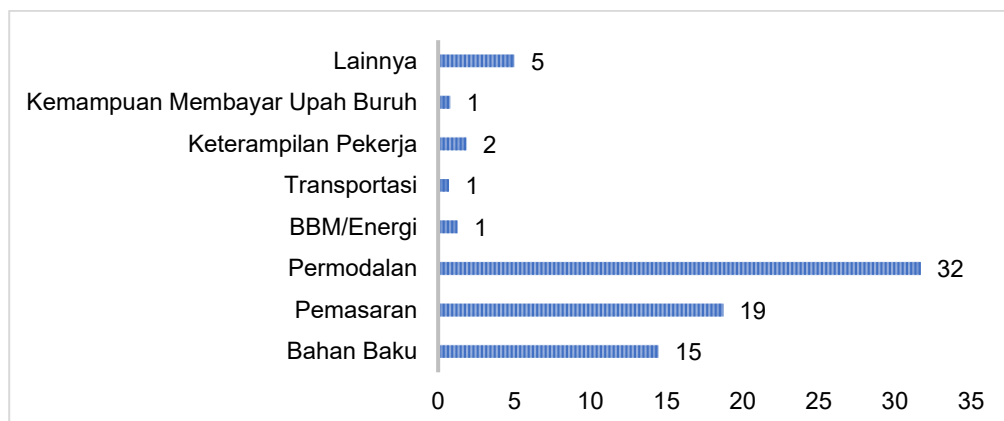
dapat dikaitkan dengan tantangan aksesibilitas, pemerataan sumber daya, dan keterbatasan fasilitas penunjang (BPS, 2023)



Gambar 1. 2 Persentase IMK Menurut Ada Tidaknya Kendala Yang Dihadapi (Persen), 2015

Sumber: data survey IMK BPS 2015 (diolah)

Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa sebagian besar pelaku Industri Mikro Kecil (IMK) di Indonesia pada tahun 2015 masih menghadapi berbagai kendala dalam menjalankan usaha mereka. Hal ini ditunjukkan oleh persentase UMK yang menyatakan mengalami kendala usaha sebesar 75 persen, sedangkan hanya 25 persen IMK yang menyatakan tidak menghadapi kendala (BPS, 2015).



Gambar 1. 3 Persentase IMK Yang Menyatakan Adanya Kendala Usaha Menurut Jenis Kendala (Persen), 2015

Sumber: data survey IMK BPS 2015 (diolah)

Hasil Survei Industri Mikro dan Kecil (IMK) tahun 2015 menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha menghadapi kendala yang bersifat struktural, dengan permodalan sebesar 32 persen dinyatakan sebagai hambatan utama dalam menjalankan kegiatan usaha. Kondisi ini menegaskan bahwa keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan masih menjadi isu krusial yang menghambat pertumbuhan sektor IMK di Indonesia. Selain itu, kendala dalam aspek pemasaran (19 persen) dan ketersediaan bahan baku (15 persen) turut memperlemah efektivitas operasional serta daya saing pelaku usaha.

Meskipun faktor seperti keterampilan pekerja, transportasi, energi, dan upah buruh tercatat dengan persentase yang relatif kecil yaitu kurang dari 2 persen, keberadaan kendala tersebut tetap memiliki implikasi terhadap efisiensi dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Pola ini memperkuat urgensi pengembangan model pembiayaan yang lebih inklusif, serta pentingnya strategi pemberdayaan IMK melalui pelatihan kewirausahaan, penguatan distribusi, dan intervensi teknologi seperti fintech lending untuk menjawab tantangan permodalan dan meningkatkan daya saing usaha secara menyeluruh.

Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program kredit usaha rakyat (KUR) dan kemudahan akses pinjaman, banyak pelaku IMK yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan formal. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada tahun 2024, tingkat inklusi keuangan mencapai 88,7 persen. Namun, survei yang dilakukan OJK pada tahun 2022 menunjukkan bahwa inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya sebesar 12,12 persen (OJK, 2022).

Selain itu, UMK juga menghadapi tantangan dalam hal kenaikan upah minimum. Kenaikan upah minimum di negara-negara ASEAN, termasuk

Indonesia, ditengarai dapat mengurangi tingkat profitabilitas UMKM dalam jangka pendek, terutama di sektor manufaktur dan perdagangan. Hal ini sering kali memaksa pelaku usaha untuk melakukan efisiensi tenaga kerja atau bahkan mengalihkan biaya tambahan kepada konsumen, yang pada akhirnya dapat mempercepat laju inflasi (Arniati, 2022).

Menurut Chariri dan Ghozali (2014), laba dipahami sebagai laba akuntansi, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya yang diukur secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laba merupakan indikator utama dalam menilai keberhasilan suatu usaha. Profitabilitas tidak hanya menunjukkan kinerja finansial tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menentukan keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi laba UMK menjadi sangat penting untuk pengembangan strategi usaha yang tepat.

Akses terhadap pembiayaan merupakan tantangan klasik yang dihadapi oleh UMK di Indonesia. Meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai program kredit usaha rakyat (KUR) dan kemudahan akses pinjaman, banyak pelaku UMK yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan formal. Penelitian oleh Anggraeni (2015) mengungkapkan bahwa UMK yang memiliki akses terhadap pinjaman dari bank cenderung mengalami peningkatan modal kerja yang berimplikasi langsung terhadap peningkatan laba. Di sisi lain, lembaga keuangan bukan bank (seperti koperasi dan fintech) juga mulai memainkan peran penting dalam ekosistem pembiayaan UMK. Studi dari Arifin dan Maulana (2024) menyatakan bahwa pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank lebih fleksibel dan cepat, namun sering kali memiliki bunga yang lebih tinggi, yang dapat mempengaruhi margin keuntungan usaha.

Literasi keuangan dan inklusi keuangan sering dianggap sebagai faktor penting yang dapat mempengaruhi akses pembiayaan dan perilaku keuangan UMKM. Penelitian dari Gustika et al. (2024) dan Elkarima et al. (2024) menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki pengaruh signifikan terhadap akses pembiayaan, namun temuan lain justru menyatakan bahwa literasi keuangan tidak berdampak signifikan terhadap kinerja UMKM (Kumalasari dan Asandimitra, 2019). Hal ini menunjukkan adanya gap dalam pemahaman mengenai bagaimana tingkat literasi keuangan yang berbeda di berbagai daerah dan jenis usaha dapat berdampak pada keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM secara spesifik, terutama dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Penelitian mengenai pengaruh Peer-to-Peer (P2P) lending terhadap kinerja UMKM juga masih tergolong baru. Studi yang ada banyak berfokus pada sisi kreditur dan dampak pinjaman terhadap kinerja UMKM pasca-pandemi (Kusbianto et al., 2024; Maulia dan Gultom, 2023). Namun, terdapat kekurangan penelitian yang mengkaji dampak jangka panjang penggunaan P2P lending terhadap keberlanjutan usaha, serta bagaimana karakteristik peminjam, seperti usia, pendidikan, dan jenis kelamin, mempengaruhi efektivitas dan risiko pinjaman tersebut.

Bentuk usaha merupakan salah satu aspek yang dapat memengaruhi laba UMK. Berdasarkan penelitian terbaru oleh Putra dan Sari (2021), bentuk usaha yang berbadan hukum cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap permodalan serta jangkauan pasar yang lebih luas dibandingkan usaha informal. Hal ini memberikan peluang lebih besar dalam meningkatkan laba. Namun, di sisi lain, pengelolaan yang lebih kompleks dan beban administrasi yang tinggi sering kali menjadi kendala bagi pelaku UMK untuk melakukan formalitas usaha.

Jenis kelamin pemilik usaha juga menjadi faktor yang menarik untuk dikaji. Penelitian dari Sari dan Nurani (2024) menunjukkan bahwa terdapat perbedaan gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan antara pemilik usaha laki-laki dan perempuan yang berdampak pada kinerja usaha. Pemilik usaha laki-laki cenderung lebih agresif dalam ekspansi dan pengambilan risiko, sedangkan perempuan lebih berhati-hati dan fokus pada kestabilan usaha. Kedua pendekatan ini memiliki implikasi yang berbeda terhadap laba usaha.

Pendidikan pemilik usaha menjadi variabel penting lainnya yang sering dikaitkan dengan kemampuan manajerial dan strategi bisnis. Menurut studi dari Nurhikmah et al., (2024), pemilik UMK yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki akses informasi yang lebih baik, pemahaman yang lebih mendalam mengenai perencanaan keuangan, serta lebih terbuka terhadap inovasi dan teknologi. Hal ini tentunya berdampak positif terhadap peningkatan laba usaha. Pendidikan juga memengaruhi kemampuan pemilik usaha dalam menjalin kemitraan dan akses terhadap pasar yang lebih luas.

Pengaruh pendidikan terhadap kinerja dan perilaku keuangan UMKM juga masih menunjukkan hasil yang bervariasi. Beberapa penelitian melaporkan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap perilaku keuangan dan kinerja UMKM (Elkarima et al., 2024), sementara yang lain tidak menemukan pengaruh signifikan (Ogubazghi, 2014; Kumalasari dan Asandimitra, 2019). Kesenjangan ini membuka peluang untuk meneliti lebih lanjut konteks dan kondisi pendidikan yang relevan dan efektif dalam mendukung keberhasilan UMKM di berbagai daerah dan sektor usaha.

Jumlah pekerja atau tenaga kerja yang dimiliki oleh UMK juga tidak bisa diabaikan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi utama dalam usaha

kecil dan menengah. Jumlah pekerja sering kali mencerminkan skala usaha. Penelitian oleh Ulya (2023) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah tenaga kerja berbanding lurus dengan kapasitas produksi dan pelayanan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba. Namun demikian, efisiensi kerja dan produktivitas menjadi aspek penting yang harus diperhatikan. Banyaknya pekerja belum tentu menjamin peningkatan laba jika tidak disertai dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik.

Lama usaha atau pengalaman dalam menjalankan bisnis juga memiliki kontribusi dalam menentukan keberhasilan usaha. UMK yang telah bertahan selama bertahun-tahun cenderung memiliki jaringan pelanggan yang luas, pemahaman pasar yang mendalam, serta kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan lingkungan usaha. Menurut riset dari Nur et al., (2023), lama usaha berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena mencerminkan stabilitas dan daya tahan usaha dalam menghadapi dinamika pasar. Usaha yang telah lama berdiri juga cenderung lebih dipercaya oleh konsumen dan mitra bisnis.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan dan akses pembiayaan UMKM telah banyak dilakukan, namun masih terdapat sejumlah kesenjangan yang perlu dikaji lebih dalam. Salah satu aspek yang mendapat perhatian adalah pengaruh gender terhadap pendapatan dan akses pembiayaan usaha. Beberapa studi menunjukkan bahwa gender tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan usaha (Mariska et al., 2024) maupun akses pembiayaan (Berger, 1998). Namun, penelitian lain mengindikasikan adanya perbedaan perilaku dalam proses negosiasi pinjaman antara petugas pinjaman laki-laki dan perempuan (Carter et al., 2007). Hal ini menunjukkan bahwa masih sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji

bagaimana perbedaan gender pemilik usaha memengaruhi dinamika akses pembiayaan dan kinerja usaha, terutama dalam konteks lokal Indonesia secara longitudinal.

Modal usaha juga telah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap pendapatan UMKM (Agustina, 2020; Syahputra dan Prayitno, 2020; Mariska et al., 2024). Namun, ada pula studi yang menemukan bahwa modal dan faktor lain seperti tenaga kerja tidak selalu berkontribusi signifikan terhadap kinerja UMKM (Kumalasari dan Asandimitra, 2019). Lebih lanjut, peran kredit sebagai variabel moderasi masih kurang mendapat perhatian, khususnya mengenai bagaimana kredit memengaruhi hubungan antara modal dan pendapatan di berbagai sektor usaha serta kondisi ekonomi pasca-pandemi.

Penelitian mengenai pengaruh Peer-to-Peer (P2P) lending terhadap kinerja UMKM juga masih tergolong baru. Studi yang ada banyak berfokus pada sisi kreditur dan dampak pinjaman terhadap kinerja UMKM pasca-pandemi (Kusbianto et al., 2024; Maulia dan Gultom, 2023). Namun, terdapat kekurangan penelitian yang mengkaji dampak jangka panjang penggunaan P2P lending terhadap keberlanjutan usaha, serta bagaimana karakteristik peminjam, seperti usia, pendidikan, dan jenis kelamin, mempengaruhi efektivitas dan risiko pinjaman tersebut.

Selain itu, kualitas laporan keuangan sering dianggap sebagai aspek penting dalam proses pengajuan kredit. Namun, studi Gustika et al. (2024) menemukan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap akses pembiayaan UMKM. Hal ini menandakan adanya kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut mengenai peran kualitas dan jenis laporan keuangan yang

efektif, serta bagaimana penyajian laporan dapat meningkatkan peluang UMKM memperoleh pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis tertarik untuk meneliti karena laba merupakan indikator utama dalam menilai kinerja dan keberlanjutan usaha IMK, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang relevan secara praktis dan teoritis. Faktor-faktor seperti bentuk usaha, jenis kelamin pemilik, tingkat pendidikan, akses terhadap pembiayaan (baik dari bank maupun lembaga keuangan non-bank), jumlah tenaga kerja, dan lama usaha terbukti dalam berbagai penelitian sebelumnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba.

Selain itu, UMK sebagai sektor strategis di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan profitabilitas. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor penentu laba menjadi penting sebagai dasar dalam perumusan strategi pengembangan UMK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah yang diambil peneliti adalah Apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan industri mikro dan kecil di indonesia pada tahun 2015?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan industri mikro dan kecil di indonesia pada tahun 2015.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang tertulis pada latar belakang, terdapat tiga manfaat penelitian yang dapat disimpulkan, diantaranya adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori dalam bidang ekonomi mikro, khususnya yang berkaitan dengan kinerja keuangan IMK. Hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas IMK di negara berkembang seperti Indonesia, serta memberikan wawasan tambahan bagi akademisi dalam mengembangkan model-model ekonomi usaha kecil.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pelaku IMK

Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai faktor-faktor penting yang dapat meningkatkan laba usaha, sehingga pelaku IMK dapat mengambil keputusan yang lebih tepat dalam pengelolaan usaha.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pemberdayaan IMK, terutama terkait akses pembiayaan dan pendidikan kewirausahaan.

c. Bagi Lembaga Keuangan

Penelitian ini dapat membantu bank dan lembaga keuangan bukan bank dalam memahami karakteristik IMK yang berpotensi

menghasilkan laba lebih tinggi, sehingga dapat menyesuaikan strategi pembiayaan mereka.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan studi lanjutan dengan data yang lebih update, variabel yang lebih luas, atau metodologi yang berbeda.